

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan analisis data dan hasil penelitian tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pembahasan dilakukan dengan mengumpulkan data-data kuesioner yang telah dikirimkan langsung kepada pejabat struktural dan pegawai dibagian keuangan. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan software *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) 22. Hasil pengolahan data merupakan informasi yang digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima maupun ditolak.

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dikirimkan langsung kepada pejabat struktural dan karyawan dibagian keuangan. Kuesioner penelitian diberikan secara langsung di tempat bekerja subjek penelitian ini yaitu di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. Jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 80 kuesioner, dimana 71 kuesioner kembali dan sebanyak 65 kuesioner yang memenuhi kriteria untuk diolah. Berikut adalah ringkasan tabel pengiriman dan pengembalian kuisisioner dalam penelitian ini dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1**Hasil Pengumpulan Data**

| No | Nama SKPD | Kuesioner yang disebar | Kuesioner yang kembali | Kuesioner yang tidak kembali | Kuesioner yang dapat diolah | Kuesioner yang tidak dapat diolah |
|-------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Inspektorat | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Dinas Pendidikan | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Dinas Perhubungan | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Dinas Kebudayaan | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Dinas Sosial | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Dinas Pertanian dan Pangan | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Dinas Kebakaran | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Dinas Pariwisata | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Kantor Pengelolaan Taman Pintar | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 80 | 71 | 9 | 65 | 6 |
| Persentase | | 100% | 89% | 11% | 92% | 8% |

Tabel 4.1 menunjukkan pengiriman kuisisioner sebanyak 80, dimana kuisisioner yang telah kembali sebanyak 71 kuisisioner dan yang memenuhi syarat untuk diolah sebanyak 65 kuisisioner, dengan *response rate* sebesar 92%.

4.2. Demografi Responden

Berikut ini merupakan tabel demografi responden mengenai umur, jenis kelamin, lama jabatan dan pendidikan terakhir yang diperoleh dari kuisisioner penelitian:

4.2.1 Jenis Kelamin

Tabel 4.2

Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|----------------------|---------------|-------------------|
| Laki-laki | 28 | 43,1% |
| Perempuan | 37 | 56,9% |
| Jumlah | 65 | 100% |

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan merupakan yang lebih banyak dipilih yaitu berjumlah 37 orang atau sebesar 57% dari total responden.

4.2.2 Umur

Tabel 4.3

Umur

| Umur | Jumlah | Persentase |
|---------------|---------------|-------------------|
| 21-25 tahun | 3 | 4,6% |
| 26-30 tahun | 9 | 13,8% |
| 31-35 tahun | 12 | 18,5% |
| 36-40 tahun | 16 | 24,6% |
| 41-45 tahun | 6 | 9,2% |
| 46-50 tahun | 14 | 21,6% |
| 51-55 tahun | 4 | 6,2% |
| 56-60 tahun | 1 | 1,5% |
| Jumlah | 65 | 100% |

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel umur diatas, diperoleh hasil bahwa responden terbanyak merupakan responden yang berumur 36-40 tahun atau sebesar 24,6% dari total responden.

4.2.3 Jabatan

Tabel 4.4
Jabatan

| Jabatan | Jumlah | Persentase |
|--|---------------|-------------------|
| Kasubag Keuangan | 11 | 16,9% |
| Kasubag Umum | 3 | 4,6% |
| Kasubid Akuntansi | 1 | 1,5% |
| Kasubid Bangunan Gedung | 1 | 1,5% |
| Kasubid Pengendalian Program | 1 | 1,5% |
| Kasubid Perencanaan Anggaran | 1 | 1,5% |
| Kasubid Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 2 | 3,1% |
| Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 2 | 3,1% |
| Auditor | 2 | 3,1% |
| Bendahara | 8 | 12,3% |
| Pengelola SAK | 4 | 6,2% |
| Verifikator Keuangan | 3 | 4,6% |
| Staf Bagian Keuangan | 26 | 40% |
| Total | 65 | 100% |

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil bahwa jabatan yang lebih banyak dipilih oleh responden adalah staf bagian keuangan sebanyak 26 orang atau sebesar 40% dari total responden.

4.2.4 Lama Menjabat

Tabel 4.5

Lama Jabatan

| Lama Menjabat | Jumlah | Persentase |
|----------------------|---------------|-------------------|
| 0-2 tahun | 26 | 39,9% |
| 3-5 tahun | 18 | 27,7% |
| 6-8 tahun | 12 | 18,5% |
| 9-11 tahun | 5 | 7,7% |
| 12-14 tahun | 3 | 4,6% |
| 15-17 tahun | 1 | 1,5% |
| Jumlah | 65 | 100% |

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil bahwa masa jabatan yang lebih banyak dipilih oleh responden adalah 0-2 tahun atau sebesar 39,9% dari total responden.

4.2.5 Pendidikan Terakhir

Tabel 4.6

Pendidikan Terakhir

| Jenjang Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| SMA | 3 | 4,6% |
| Diploma | 14 | 21,5% |
| S1 | 31 | 47,7% |
| S2 | 17 | 26,2% |
| Jumlah | 65 | 100% |

Sumber: data primer diolah

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir S-1 merupakan yang paling banyak dipilih yaitu berjumlah 31 orang atau 47,7% dari total responden.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran atau deskripsi mengenai suatu data. Dalam penelitian ini analisis hasil pengujian statistik deskriptif menggunakan nilai *minimum*, nilai *maximum*, nilai *mean*, dan nilai *standard deviation*. Berikut hasil analisis pengujian statistik deskriptif dan analisis penelitian:

Tabel 4.7

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| Variabel | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---|----------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Kejelasan Sasaran Anggaran | 65 | 2,25 | 4,00 | 3,2558 | 0,39493 |
| Pengendalian Akuntansi | 65 | 2,22 | 3,67 | 3,0410 | 0,31838 |
| Sistem Pelaporan | 65 | 2,40 | 4,00 | 3,1785 | 0,36077 |
| Ketaatan Peraturan Perundangan | 65 | 2,29 | 4,00 | 3,1626 | 0,37019 |
| Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 65 | 2,30 | 4,00 | 3,1323 | 0,37043 |

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai minimum 2,25 dan nilai maksimum 4,00 yang berarti bahwa semakin tinggi nilai yang diberikan

maka semakin baik tingkat kejelasan sasaran anggaran di instansi tersebut. Nilai rata-rata sebesar 3,2558 merepresentasikan bahwa kejelasan sasaran anggaran di instansi tersebut sudah cukup tepat sasaran. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,39493 ukuran penyebaran data dari variabel kejelasan sasaran anggaran adalah sebesar 0,39493 dari 65 responden.

2. Variabel pengendalian akuntansi memiliki nilai minimum 2,22 dan nilai maksimum 3,67 yang berarti bahwa semakin tinggi nilai yang diberikan maka semakin efektif pengendalian akuntansi yang diterapkan oleh instansi tersebut. Nilai rata-rata sebesar 3,0410 merepresentasikan bahwa pengendalian akuntansi yang diterapkan oleh instansi tersebut sudah efektif. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,31838 ukuran penyebaran data dari variabel pengendalian akuntansi adalah sebesar 0,31838 dari 65 responden.
3. Variabel sistem pelaporan memiliki nilai minimum 2,40 dan nilai maksimum 4,00 yang berarti bahwa semakin tinggi nilai yang diberikan maka semakin baik sistem pelaporan yang dilakukan di instansi tersebut. Nilai rata-rata sebesar 3,1785 merepresentasikan bahwa sistem pelaporan yang dilakukan di instansi tersebut sudah baik. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,36077 ukuran penyebaran data dari variabel sistem pelaporan adalah sebesar 0,36077 dari 65 responden.
4. Variabel ketaatan peraturan perundangan memiliki nilai minimum 2,29 dan nilai maksimum 4,00 yang berarti bahwa semakin tinggi nilai yang diberikan maka semakin tinggi pula peraturan perundangan yang telah

ditaati. Nilai rata-rata sebesar 3,1626 merepresentasikan bahwa instansi tersebut sudah menaati peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,37019 ukuran penyebaran data dari variabel ketaatan peraturan perundangan adalah sebesar 0,37019 dari 65 responden.

5. Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai minimum 2,30 dan nilai maksimum 4,00 yang berarti bahwa semakin tinggi nilai yang diberikan maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja suatu instansi. Nilai rata-rata sebesar 3,1323 merepresentasikan bahwa akuntabilitas kinerja pada instansi tersebut sudah baik. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,37043 ukuran penyebaran data dari variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 0,37043 dari 65 responden.

4.4. Uji Kualitas Data

4.4.1 Uji Validitas Data

Uji validitas merupakan alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011). Pengujian ini dilakukan dengan metode korelasi dari Pearson dimana pengujian dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi yang menyatakan hubungan antara skor butir pertanyaan dengan skor total. Pertanyaan dikatakan valid jika r hitung $>$ r tabel. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Kejelasan Sasaran Anggaran

| Item Pertanyaan | Pearson Correlation | Sig. | Keterangan |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| KSA 1 | 0,747 | 0,000 | Valid |
| KSA 2 | 0,718 | 0,000 | Valid |
| KSA 3 | 0,816 | 0,000 | Valid |
| KSA 4 | 0,652 | 0,000 | Valid |
| KSA 5 | 0,818 | 0,000 | Valid |
| KSA 6 | 0,732 | 0,000 | Valid |
| KSA 7 | 0,606 | 0,000 | Valid |
| KSA 8 | 0,586 | 0,000 | Valid |

Sumber: data primer, diolah

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Pengendalian Akuntansi

| Item Pertanyaan | Pearson Correlation | Sig. | Keterangan |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| PA 1 | 0,440 | 0,000 | Valid |
| PA 2 | 0,340 | 0,000 | Valid |
| PA 3 | 0,544 | 0,000 | Valid |
| PA 4 | 0,647 | 0,000 | Valid |
| PA 5 | 0,293 | 0,000 | Valid |
| PA 6 | 0,717 | 0,000 | Valid |
| PA 7 | 0,760 | 0,000 | Valid |
| PA 8 | 0,709 | 0,000 | Valid |
| PA 9 | 0,651 | 0,000 | Valid |

Sumber: data primer, diolah

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Sistem Pelaporan

| Item Pertanyaan | Pearson Correlation | Sig. | Keterangan |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| SP 1 | 0,825 | 0,000 | Valid |
| SP 2 | 0,688 | 0,000 | Valid |
| SP 3 | 0,592 | 0,000 | Valid |
| SP 4 | 0,729 | 0,000 | Valid |
| SP 5 | 0,749 | 0,000 | Valid |

Sumber: data primer, diolah

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Ketaatan Peraturan Perundangan

| Item Pertanyaan | Pearson Correlation | Sig. | Keterangan |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| KPP 1 | 0,770 | 0,000 | Valid |
| KPP 2 | 0,693 | 0,000 | Valid |
| KPP 3 | 0,820 | 0,000 | Valid |
| KPP 4 | 0,832 | 0,000 | Valid |
| KPP 5 | 0,624 | 0,000 | Valid |
| KPP 6 | 0,761 | 0,000 | Valid |
| KPP 7 | 0,856 | 0,000 | Valid |

Sumber: data primer, diolah

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

| Item Pertanyaan | Pearson Correlation | Sig. | Keterangan |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| AKIP 1 | 0,667 | 0,000 | Valid |
| AKIP 2 | 0,821 | 0,000 | Valid |

| | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| AKIP 3 | 0,659 | 0,000 | Valid |
| AKIP 4 | 0,886 | 0,000 | Valid |
| AKIP 5 | 0,753 | 0,000 | Valid |
| AKIP 6 | 0,799 | 0,000 | Valid |
| AKIP 7 | 0,829 | 0,000 | Valid |
| AKIP 8 | 0,823 | 0,000 | Valid |
| AKIP 9 | 0,756 | 0,000 | Valid |
| AKIP 10 | 0,783 | 0,000 | Valid |

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui besaran koefisien korelasi dari seluruh item pertanyaan variabel-variabel penelitian. Nilai R tabel dengan $n = 65$ dan tingkat signifikansi 0,01 sebesar 0,317 dan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 0,244. Dari hasil perhitungan item pertanyaan variabel-variabel penelitian mempunyai nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel artinya seluruh item pertanyaan variabel-variabel penelitian valid sehingga dapat digunakan untuk mengukur data penelitian selanjutnya.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan atau kesungguhan responden menjawab pertanyaan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*. Semakin besar nilai alpha ($> 0,6$ atau mendekati 1) akan semakin reliabel data tersebut. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4.13

Hasil Uji Reliabilitas Data

| Variabel | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|---|-------------------------|-------------------|
| Kejelasan Sasaran Anggaran | 0,858 | Reliabel |
| Pengendalian Akuntansi | 0,664 | Reliabel |
| Sistem Pelaporan | 0,759 | Reliabel |
| Ketaatan Peraturan Perundangan | 0,876 | Reliabel |
| Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 0,927 | Reliabel |

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabel-variabel penelitian tersebut > 0.60 atau mendekati 1. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam variabel-variabel penelitian tersebut adalah reliabel, sehingga dapat digunakan untuk instrumen penelitian selanjutnya.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Berikut hasil pengujian normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test* :

Tabel 4.14

Uji Normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test*

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | Unstandardized Residual |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 65 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | ,22437632 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,088 |
| | Positive | ,055 |
| | Negative | -,088 |
| Test Statistic | | ,088 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test* di atas, disimpulkan bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, yang berarti data berdistribusi normal dan layak untuk dianalisis pada penelitian selanjutnya.

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk membuktikan apakah terdapat hubungan linier antar variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat pada *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor (VIF)*, jika *tolerance value* dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinieritas (Gujarati, 1995). Berikut hasil uji multikolinieritas.

Tabel 4.15

Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | <i>Tolerance</i> | <i>Variance Inflation Factor (VIF)</i> |
|--------------------------------|-------------------------|---|
| Kejelasan Sasaran Anggaran | 0,398 | 2,511 |
| Pengendalian Akuntansi | 0,343 | 2,919 |
| Sistem Pelaporan | 0,401 | 2,496 |
| Ketaatan Peraturan Perundangan | 0,381 | 2,624 |

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, didapatkan hasil bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran dengan nilai *tolerance* sebesar 0,398 dan *VIF* sebesar 2,511, variabel pengendalian akuntansi dengan nilai *tolerance* sebesar 0,343 dan *VIF* sebesar 2,919, variabel sistem pelaporan dengan nilai *tolerance* sebesar 0,401 dan *VIF* sebesar 2,496 dan variabel ketaatan peraturan perundangan dengan nilai *tolerance* sebesar 0,381 dan *VIF* sebesar 2,624 dapat disimpulkan bahwa nilai *tolerance* >0,10 atau sama dengan nilai *VIF* < 10 untuk keempat variabel di atas, yang artinya tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen.

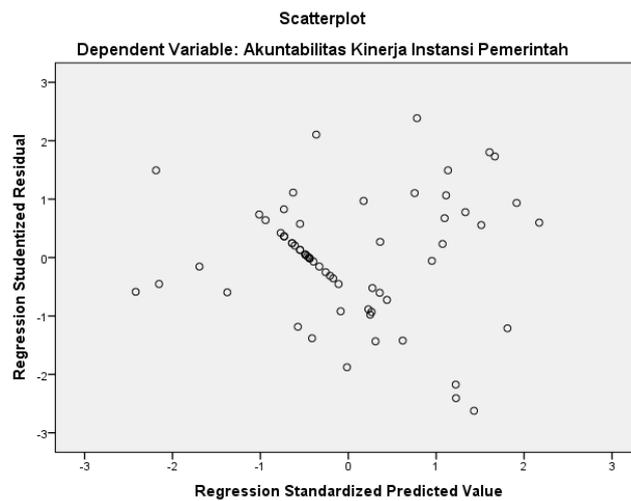
4.5.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode chart (diagram *Scatterplot*). Jika ada titik-titik yang membentuk pola tertentu dan

beraturan serta menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas dan menyebar ke atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heterokedastisitas.

Gambar 4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik *Scatterplot*



Berdasarkan grafik *scatterplots* di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji regresi linier berganda.

Tabel 4.16
Hasil Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | ,264 | ,295 | | ,893 | ,376 |
| Kejelasan Sasaran Anggaran | ,371 | ,116 | ,396 | 3,196 | ,002 |
| Pengendalian Akuntansi | ,322 | ,155 | ,277 | 2,070 | ,043 |
| Sistem Pelaporan | ,028 | ,127 | ,028 | ,224 | ,824 |
| Ketaatan Peraturan Perundangan | ,187 | ,127 | ,186 | 1,472 | ,146 |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Model regresi yang didapat dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,264 + 0,371 \text{ KSA} + 0,322 \text{ PA} + 0,028 \text{ SP} + 0,187 \text{ KPP}$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,264 berarti ketiga variabel tersebut dianggap konstan maka rata-rata akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,264.
2. Kejelasan sasaran anggaran dengan koefisien 0,371 positif berarti menyatakan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran meningkat sebesar 1 satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 0,371 satuan.
3. Pengendalian akuntansi dengan koefisien 0,322 positif berarti menyatakan bahwa variabel pengendalian akuntansi meningkat sebesar

1 satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meningkat sebesar 0,322 satuan.

4. Sistem pelaporan dengan koefisien 0,028 positif berarti menyatakan bahwa variabel sistem pelaporan meningkat sebesar 1 satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 0,028 satuan.
5. Ketaatan peraturan perundangan dengan koefisien 0,187 positif berarti menyatakan bahwa variabel ketaatan peraturan perundangan meningkat sebesar 1 satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 0,187 satuan.

4.7 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Berikut hasil pengujian koefisien determinasi.

Tabel 4.17

Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model | R | <i>R Square</i> | <i>Adjusted R Square</i> |
|--------------|----------|------------------------|---------------------------------|
| | 0,796 | 0,633 | 0,609 |

Sumber: data primer, diolah

Dari hasil analisis regresi linier berganda tersebut dapat terlihat bahwa nilai determinasi atau *Adjusted R Square* sebesar 0,609 yang menunjukkan bahwa

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan ketaatan peraturan perundangan sebesar 60,9% sisanya yaitu 39,1% akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

4.8 Uji Stastistik F

Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Kriteria Uji F ini jika probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak dan jika $< 0,05$ maka H_a diterima. Berikut hasil uji statistik F.

Tabel 4.18
Hasil Uji Stastistik F

| Probabilitas (signifikan-F) | Keterangan |
|------------------------------------|-------------------|
| 0,000 | Signifikan |

Sumber: data primer, diolah

Dari tabel 4.18 di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas hitung adalah 0,000 yaitu $< 0,05$ maka keputusan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan ketaatan peraturan perundangan mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.9 Uji Hipotesis

Tabel 4.19

Hasil Uji Hipotesis

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | ,264 | ,295 | | ,893 | ,376 |
| Kejelasan Sasaran Anggaran | ,371 | ,116 | ,396 | 3,196 | ,002 |
| Pengendalian Akuntansi | ,322 | ,155 | ,277 | 2,070 | ,043 |
| Sistem Pelaporan | ,028 | ,127 | ,028 | ,224 | ,824 |
| Ketaatan Peraturan Perundangan | ,187 | ,127 | ,186 | 1,472 | ,146 |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel di atas menunjukkan hasil hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengujian terhadap hipotesis ini melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari kejelasan sasaran anggaran. Berdasarkan tabel di atas, dihasilkan koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,371 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut dikatakan signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini **diterima**. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2011) pada SKPD Kota Jambi ,

Anjarwati (2012) di SKPD Kota Tegal dan Pemalang, Yulianti (2014) di SKPD Kabupaten Pelalawan, Kaltsum dan Rohman (2014) pada SKPD Kota Salatiga, Cahyani dan Utama (2015) pada SKPD Kota Denpasar dan Setyawan (2017) di SKPD Kabupaten Kampar, Riau.

H2 : Pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengujian terhadap hipotesis ini melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari pengendalian akuntansi. Berdasarkan tabel di atas, dihasilkan koefisien regresi pengendalian akuntansi sebesar 0,322 dengan nilai signifikansi sebesar 0,043. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut dikatakan signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga hipotesis pertama (H2) dalam penelitian ini **diterima**. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2014), Cahyani dan Utama (2015) dan Setyawan (2017)

H3 : Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengujian terhadap hipotesis ini melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari sistem pelaporan. Berdasarkan tabel di atas, dihasilkan koefisien regresi sistem pelaporan sebesar 0,028 dengan nilai signifikansi sebesar 0,824. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut dikatakan tidak

signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,824 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini berarti bahwa dalam penelitian ini belum bisa membuktikan hubungan antara sistem pelaporan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Yogyakarta.

Adanya ketidaksignifikan hasil pada sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu ada beberapa aspek pertanyaan yang rata-ratanya dibawah rata-rata total per variabel yang artinya belum efektif diterapkan pada instansi terkait. Hal itu bisa disebabkan oleh butir pernyataan yang sulit dipahami oleh responden. Aspek pernyataan yang belum efektif terdiri dari laporan keuangan yang dihasilkan pada instansi terkait telah memberikan informasi untuk mengoreksi ekspektasi dimasa lalu, informasi telah disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum tidak berpihak pada kebutuhan khusus dan informasi yang disajikan oleh instansi terkait dapat dipahami oleh pengguna serta dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Selain pertanyaan, ada hal lain yang berhubungan dengan ketidaksignifikan sistem pelaporan yaitu adanya temuan tunggakan pajak reklame, tunggakan pajak hotel dan tunggakan retribusi sampah. Dimana temuan tersebut ditemukan oleh BPK pada saat pemeriksaan laporan milik Pemerintah Kota Yogyakarta (<http://id.beritasatu.com>).

H4 : Ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengujian terhadap hipotesis ini melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari ketaatan peraturan perundangan. Berdasarkan tabel di atas, dihasilkan koefisien regresi sistem pelaporan sebesar 0,187 dengan nilai signifikansi sebesar 0,146. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut dikatakan tidak signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,146 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini berarti bahwa ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini **ditolak**.

Hal ini berarti bahwa dalam penelitian ini belum bisa membuktikan hubungan antara ketaatan peraturan perundangan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lumenta, Morasa dan Mawikere (2016) pada SKPD Kabupaten Minahasa Selatan.

Adanya ketidaksignifikan ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikarenakan oleh aspek pernyataan yang rata-ratanya berada dibawah rata-rata total variabel yang artinya belum efektif diterapkan pada instansi terkait. Hal itu bisa disebabkan oleh butir pernyataan yang sulit dipahami oleh responden yang menyebabkan belum maksimalnya jawaban dari responden tersebut. Pernyataan tersebut antara lain pemberian sanksi kepada pejabat yang tidak mentaati peraturan perundangan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005, pembuatan laporan

keuangan sesuai PP No. 71 tahun 2010 dan pedoman pengelolaan keuangan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis di atas, maka dapat diperoleh ringkasan hasil penelitian pada tabel 4.20 sebagai berikut:

Tabel 4.20

Ringkasan Hasil Penelitian

| Hipotesis | Keterangan Hipotesis | B | Sig. | Kesimpulan |
|------------------|---|----------|-------------|-------------------|
| 1 | Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | 0,371 | 0,002 | Didukung |
| 2 | Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | 0,322 | 0,043 | Didukung |
| 3 | Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | 0,028 | 0,824 | Tidak Didukung |
| 4 | Ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | 0,187 | 0,146 | Tidak Didukung |